



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : DARMAWAN JUFRI
NIK : 3372031607690002
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Unit Kerja : RSJD SURAKARTA
Sub Unit Kerja : BAGIAN KEUANGAN
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN & VERIFIKASI
Jenis Laporan : Khusus - Awal Menjabat
Tanggal Kirim : 7 Januari 2022

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DARMAWAN JUFRI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN & VERIFIKASI
3. NHK : 849295

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m²/36 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 27.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO J Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.125.390

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 241.925.390

III. HUTANG Rp. 137.431.910

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 104.493.480

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.